



PANCASILA SEBAGAI FONDASI ETIKA DIGITAL: MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DAN DISRUPSI TEKNOLOGI

Raqhel Candy Vertika¹, Hana Aprilia Hakim², Joshua Andika Zion. S³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Email : raqhelcandy760@gmail.com, hanaapriliah01@gmail.com,
joshuaandika964@gmail.com

Abstract: The digital era and globalization have brought about significant changes in the way humans interact, think, and behave. Technological disruption presents both opportunities and ethical challenges that have the potential to shift the nation's moral values. This article aims to examine the role of Pancasila as a foundation for digital ethics to maintain national identity and societal morality amidst globalization. The research method used is descriptive qualitative with literature analysis from various trusted academic sources. The results of the discussion indicate that Pancasila values can serve as moral and ethical guidelines in the use of digital technology in accordance with the principles of humanity and social justice.

Keywords: *Globalization, Technology, Challenges, Value Strengthening.*

Abstrak: Era digital dan globalisasi membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, berpikir, dan berperilaku. Disrupsi teknologi menghadirkan peluang sekaligus tantangan etis yang berpotensi menggeser nilai-nilai moral bangsa. Artikel ini bertujuan menelaah peran Pancasila sebagai fondasi etika digital untuk menjaga identitas nasional dan moralitas masyarakat di tengah arus globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis literatur dari berbagai sumber akademik terpercaya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman moral dan etika dalam penggunaan teknologi digital agar sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Kata Kunci : *Globalisasi, Teknologi, Tantangan, Penguatan Nilai.*

PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan tanda utama perubahan peradaban manusia modern. Dunia digital telah membuka ruang baru bagi manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berkreasi tanpa batas. Media sosial, platform daring, dan teknologi berbasis kecerdasan buatan telah mengubah cara masyarakat berpikir dan berperilaku. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, era digital juga membawa konsekuensi moral yang signifikan: meningkatnya penyalahgunaan informasi, penyebaran kebencian, serta munculnya sikap individualistik dan intoleran. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan kematangan moralitas masyarakat. Kemajuan teknologi digital tidak otomatis diikuti dengan kedewasaan dalam penggunaannya. Karena itu, diperlukan nilai dasar yang kokoh untuk menjadi pedoman

moral dalam menghadapi tantangan tersebut. Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara, memiliki potensi besar untuk dijadikan landasan etika digital.

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bersifat universal dan kontekstual dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai etika moral digital di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi.¹

Perkembangan teknologi informasi telah mempercepat proses globalisasi. Dunia kini terhubung secara digital melalui jaringan internet, yang memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik. Namun, globalisasi yang tidak diimbangi dengan kesadaran etis dapat menimbulkan efek negatif terhadap moral dan budaya masyarakat. Di Indonesia, dampak globalisasi tampak dalam bentuk menurunnya rasa nasionalisme, lunturnya sopan santun dalam komunikasi daring, serta meningkatnya perilaku konsumtif dan hedonistik yang dipicu oleh budaya digital global.

Pancasila memiliki fungsi sentral dalam menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi tersebut. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang relevan untuk menjadi pedoman perilaku digital. Misalnya, Sila Kedua menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia dalam setiap bentuk interaksi, termasuk dalam komunikasi daring; sementara Sila Kelima menekankan keadilan sosial, yang dapat diterapkan dalam prinsip keadilan digital seperti akses informasi yang setara. Dengan demikian, penguatan Pancasila dalam konteks digital bukan sekadar pengulangan ideologi klasik, tetapi reinterpretasi nilai-nilai moral bangsa untuk menghadapi realitas baru yang lebih kompleks².

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh globalisasi dan disrupsi teknologi terhadap perilaku etika masyarakat di era digital?
2. Mengapa Pancasila perlu dijadikan sebagai fondasi dalam membangun etika digital di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan moral dan sosial di ruang digital?
4. Apa peran pendidikan dan kebijakan nasional dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi informasi?
5. Bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai filter terhadap dampak negatif globalisasi budaya di dunia digital?

¹ Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Cilacap: CV. Alinea Edumedia Press, hlm. 125–126.

² Kaelan, M.S. (2018). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, hlm. 34–36.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema Pancasila, etika digital, dan globalisasi. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan tantangan etika dalam dunia digital yang terus berkembang.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Dasar Etika Digital

Etika digital mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku di ruang siber agar tetap menghormati hak dan martabat sesama pengguna. Pancasila dapat dijadikan dasar pembentukan etika digital karena nilai-nilainya bersifat universal dan humanis. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kesadaran moral dan spiritual bahwa segala tindakan manusia, termasuk di dunia maya, berada di bawah pengawasan Tuhan. Hal ini menuntut pengguna digital untuk berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar norma agama. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya menghormati martabat manusia. Dalam konteks digital, ini berarti menolak praktik seperti penghinaan daring, penyebaran kebencian, atau pelanggaran privasi. Sila Persatuan Indonesia menuntut setiap warga negara menjaga persatuan bangsa melalui komunikasi yang santun dan inklusif di media sosial. Sementara Sila Kerakyatan dan Sila Keadilan Sosial menuntut pengguna teknologi untuk menggunakan platform digital secara adil, bijak, dan menghindari diskriminasi.⁴

Tantangan Globalisasi dan Disrupsi Teknologi

Era disrupsi digital menandai perubahan besar dalam cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan media sosial mengubah pola hubungan sosial secara mendasar. Namun, tanpa kendali moral, teknologi dapat menjadi alat yang membahayakan. Fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan daring, dan penipuan digital menunjukkan lemahnya kesadaran etika di dunia maya. Globalisasi memperparah keadaan ini dengan memperluas pengaruh budaya luar yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, diperlukan pembumian nilai-nilai Pancasila agar masyarakat Indonesia tetap memiliki pegangan moral dalam menghadapi derasnya perubahan teknologi.⁵ Salah satu cara efektif untuk menanamkan kesadaran ini adalah melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital. Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan

³ Darmawan, D. (2020). *Teknologi Informasi dan Globalisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm. 41–42

⁴ Notonagoro. (2006). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 58–60.

⁵ Sumoto. (2019). *Pancasila di Era Digitalisasi Global*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 22–24.

teknis (digital skills), tetapi juga pada nilai etika (digital ethics). Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga berakhlak dan bertanggung jawab.⁶

Pancasila Sebagai Filter Globalisasi Budaya

Salah satu dampak globalisasi yang paling terasa adalah masuknya budaya asing melalui internet dan media sosial. Budaya global membawa nilai-nilai yang sering kali bertentangan dengan norma dan tradisi Indonesia. Misalnya, munculnya perilaku hedonistik, individualisme, dan penurunan rasa hormat terhadap otoritas sosial. Dalam konteks ini, Pancasila dapat berfungsi sebagai filter budaya. Nilai-nilai Pancasila membantu masyarakat memilah mana pengaruh budaya luar yang sesuai dan mana yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, kesopanan, dan kebersamaan harus dijaga agar tidak tergeser oleh budaya global yang serba instan dan kompetitif.⁷ Mulyono menyatakan bahwa Pancasila mampu menjadi tolok ukur dalam menyaring pengaruh globalisasi agar tetap sesuai dengan moral bangsa.⁸ Wahyono menambahkan bahwa penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan digital nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya tahan budaya Indonesia di tengah arus global.⁹

Strategi Penguatan

Strategi Pendidikan: Integrasi Nilai Pancasila dalam Literasi Digital

Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Kurikulum pendidikan di semua jenjang perlu mengintegrasikan etika digital berbasis Pancasila agar peserta didik tidak hanya cakap teknologi tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dalam penggunaannya. Kegiatan pembelajaran harus diarahkan pada pengembangan karakter, empati digital, dan budaya sopan santun dalam komunikasi daring. Guru dan dosen perlu menjadi agen pembudayaan nilai-nilai Pancasila di dunia maya, melalui contoh penggunaan media digital yang santun dan beretika.¹⁰

⁶ Sugiarto, B. (2020). "Peran Pendidikan dalam Menanamkan Nilai Pancasila di Era Digital." *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), hlm. 17–18.

⁷ Suryadianta, L. (2019). *Globalisasi dan Identitas Nasional di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, hlm. 45–46.

⁸ Mulyono, D. (2022). "Pancasila sebagai Filter Globalisasi Budaya." *Jurnal Ideologi dan Politik*, 7(3), hlm. 102–104.

⁹ Wahyono, H. (2020). *Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Perubahan Global*. Surakarta: UNS Press, hlm. 78–79.

¹⁰ Sugiarto, B. (2020). "Peran Pendidikan dalam Menanamkan Nilai Pancasila di Era Digital." *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(1), hlm. 19–20.

Strategi Sosial Budaya: Rekontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Dunia Digital

Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan sopan santun perlu diangkat kembali dalam konteks digital. Kearifan lokal dapat dijadikan filter budaya digital agar masyarakat tetap memiliki kepribadian Indonesia meskipun hidup di era global. Misalnya, dengan mempromosikan konten positif berbasis budaya lokal, penggunaan bahasa yang santun di media sosial, serta kampanye digital yang menonjolkan nilai-nilai kebersamaan. Upaya ini akan memperkuat identitas nasional sekaligus menanamkan kesadaran bahwa etika digital harus berakar pada moral bangsa.¹¹

Strategi Kebijakan Nasional: Regulasi dan Tata Kelola Etika Digital

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem digital yang berkeadaban. Kebijakan seperti UU ITE, program literasi digital nasional, dan kurikulum Pancasila Profil Pelajar Pancasila harus diperkuat implementasinya. Pemerintah juga perlu menggandeng lembaga nonformal, komunitas digital, serta influencer untuk menumbuhkan kesadaran moral di ruang maya. Selain itu, lembaga penegak hukum harus memastikan perlindungan terhadap hak digital warga negara tanpa melanggar prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.¹²

Strategi Teknologis: Penguatan Etika dalam Inovasi dan Platform Digital

Etika Pancasila harus menjadi dasar dalam setiap inovasi teknologi di Indonesia. Pengembang aplikasi, perusahaan digital, dan lembaga pemerintah harus menerapkan prinsip tanggung jawab sosial dalam desain sistem digital, seperti mencegah penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan konten yang melanggar nilai kemanusiaan. Selain itu, perlu dibentuk kode etik digital nasional yang memuat nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku daring bagi semua pengguna teknologi, baik individu maupun institusi.¹³

Strategi Kolaboratif: Sinergi Pemerintah, Akademisi, dan Masyarakat Digital

Penguatan Pancasila di era digital tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi lintas bidang antara pemerintah, dunia pendidikan, komunitas digital, dan media massa. Kegiatan seperti seminar, kampanye digital bertema “Etika Pancasila Online,” lomba konten kreatif bertema nasionalisme, dan pelatihan literasi digital dapat menjadi sarana membangun kesadaran kolektif. Melalui kolaborasi ini, nilai-nilai

¹¹ Mulyono, D. (2022). “Pancasila sebagai Filter Globalisasi Budaya.” *Jurnal Ideologi dan Politik*, 7(3), hlm. 105–106.

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud, hlm. 21–22.

¹³ Darmawan, D. (2020). *Teknologi Informasi dan Globalisasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm. 43–44.

Pancasila tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar hidup dalam perilaku masyarakat digital Indonesia.¹⁴

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital dan globalisasi telah membawa dampak yang sangat besar terhadap perubahan pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial masyarakat Indonesia. Di satu sisi, kemajuan digital membuka ruang bagi percepatan informasi, kreativitas, dan ekonomi digital yang produktif. Namun di sisi lain, disrupsi teknologi menimbulkan berbagai persoalan etika, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, hingga degradasi moral di ruang maya. Dalam konteks inilah, Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis sebagai fondasi etika digital untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan moralitas bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung nilai-nilai universal yang dapat dijadikan pedoman etika dalam penggunaan teknologi. Nilai Ketuhanan menuntun manusia untuk bertanggung jawab secara spiritual atas setiap tindakan digitalnya; nilai kemanusiaan menekankan pentingnya empati dan penghormatan terhadap martabat orang lain di dunia maya. Nilai Persatuan mendorong terciptanya ruang digital yang inklusif dan tidak memecah belah. Nilai Kerakyatan menegaskan pentingnya musyawarah dan komunikasi sehat di media sosial, sedangkan nilai Keadilan menjadi dasar distribusi informasi dan akses teknologi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi, penguatan nilai-nilai Pancasila dalam etika digital harus dilakukan melalui berbagai strategi terpadu. Strategi pendidikan perlu menanamkan kesadaran etika digital sejak dini agar generasi muda tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral.

Strategi sosial budaya menekankan pentingnya rekontekstualisasi kearifan lokal sebagai identitas nasional dalam dunia digital. Strategi kebijakan nasional harus memperkuat regulasi dan literasi digital berbasis Pancasila untuk menciptakan ruang digital yang aman dan beradab. Strategi teknologis menuntut agar inovasi digital di Indonesia berlandaskan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Terakhir, strategi kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat digital menjadi kunci agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat konseptual, tetapi benar-benar diinternalisasikan dalam kehidupan digital sehari-hari.

Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar ideologi normatif, melainkan juga sistem nilai yang hidup dan relevan di era digital. Nilai-nilai Pancasila mampu menjadi pedoman moral dalam menghadapi dampak negatif globalisasi dan disrupsi teknologi,

¹⁴ Wahyono, H. (2020). Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Perubahan Global. Surakarta: UNS Press, hlm. 80–81.

sekaligus memastikan bahwa perkembangan digital Indonesia tetap berakar pada jati diri bangsa. Melalui penguatan nilai-nilai tersebut, Indonesia berpotensi menjadi contoh negara yang berhasil memadukan kemajuan teknologi dan kematangan etika, sehingga transformasi digital dapat berjalan sejalan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana cita-cita luhur Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmuwason, D. (2009). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, Z. (2025b). Pancasila dan Kewarganegaraan. Cilacap: CV. Alinea Edumedia Press.
- Kaelan, M.S. (2018). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemendikbud. (2021). Pendidikan Pancasila untuk Mahasiswa. Jakarta.
- Kusumo, N., & Dewi, R. S. (2023). Pancasila sebagai Benteng Ideologi dalam Menghadapi Arus Globalisasi Budaya. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1-10.
- Latif, Y. (2015). Revolusi Pancasila. Jakarta: Mizan.
- Mulyono, D. (2022). Pancasila sebagai Filter Globalisasi Budaya. *Jurnal Ideologi dan Politik*, 7(3), 102-106.
- Naskah/Rambu. (2000). Pancasila Sebagai Filter Globalisasi. Yogyakarta: Despublih.
- Nurdin, A. S., & Alvian, B. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Siswa di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 5220-5230.
- Pramono, E. Y., dkk. (2020). Revitalisasi Pengamalan Pancasila di Kalangan Generasi Z dalam Perspektif Tantangan Global. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 1-15.
- Setiadi, S. A. (2019). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, S. (2022). Transformasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan Abad ke-21. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suseno, R. (2020). Etika Pendidikan dalam Meminternasionalisasi Nilai Pancasila di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 3(1), 19-20.

Wahyono, H. (2020). Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Perubahan Global. Surakarta: UNS Press.

Wibowo, A. J. (2017). Implementasi Pancasila sebagai Paradigma Etika Politik di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(3), 608-628.